

**KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO :
STUDI PADA SATGAS PPK-PT UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Aretha Sandrina, Amni Zarkasyi Rahman

**Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024)7465407 Faksimile (024)7465405**

Laman : www.fisip.undip.ac.id

Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Policy communication is a vital aspect of policy implementation, particularly in ensuring that policy-related information is effectively transmitted, received, and understood by both implementers and the policy's target. In the context of preventing and handling violence in education aspect, policy communication plays a central role in disseminating information regarding the existence, roles, and operational mechanisms of the Task Force for the Prevention and Handling of Violence in Higher Education (Satgas PPK-PT) to the academic community. This study aims to analyze how policy communication is implemented in the execution of such policies at Diponegoro University using a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews to capture the perspectives and experiences of relevant informants. The analysis is guided by George Edward III's policy implementation framework, which emphasizes three factors of communication, which are transmission, clarity, and consistency. The results reveal that policy communication conducted by the Satgas PPK-PT at Diponegoro University has not been fully optimal, particularly due to limited dissemination reach and the low visibility of messages among students, resulting in uneven levels of awareness regarding the task force's functions and procedures. Consequently, there is a need to strengthen communication strategies by enhancing the reach, clarity, and consistency of information delivery so that policy messages can be more effectively and evenly understood across the academic community, thereby supporting the overall success of violence prevention and handling policies in higher education.

Keywords: Policy Communication, Violence, PPK-PT Task Force.

ABSTRAK

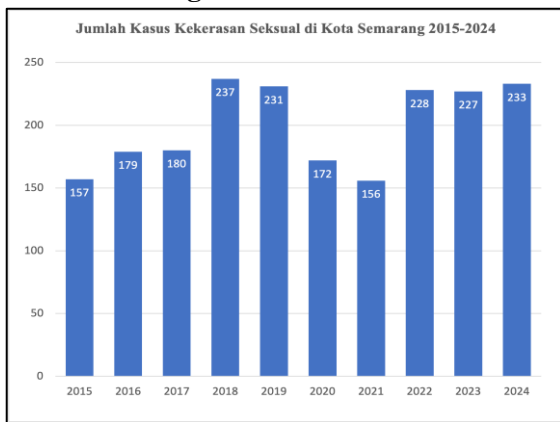
Komunikasi kebijakan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, terutama dalam memastikan bahwa informasi terkait kebijakan dapat disampaikan, diterima, dan dipahami secara efektif oleh para pelaksana maupun sasaran kebijakan. Dalam penelitian pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan, komunikasi kebijakan memiliki peran sentral dalam menyebarkan informasi mengenai keberadaan, peran, serta mekanisme operasional Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPK-PT) kepada seluruh civitas akademika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi kebijakan diimplementasikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di Universitas Diponegoro dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam untuk menggali perspektif dan pengalaman para informan yang relevan. Analisis penelitian ini mengarah pada kerangka implementasi kebijakan dari George Edward III yang menekankan tiga faktor komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro belum sepenuhnya optimal, terutama karena keterbatasan jangkauan diseminasi informasi serta rendahnya visibilitas pesan di kalangan mahasiswa, yang mengakibatkan tingkat pemahaman yang belum merata terkait fungsi dan prosedur satuan tugas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi komunikasi kebijakan melalui peningkatan jangkauan, kejelasan, dan konsistensi penyampaian informasi agar pesan kebijakan dapat dipahami secara lebih efektif dan merata di lingkungan civitas akademika, sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi.

Kata kunci: Komunikasi Kebijakan, Kekerasan, Satgas PPK-PT.

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia, menurut Kemendikbud Ristek, kekerasan adalah setiap tindakan atau keputusan seseorang yang berdampak pada luka/penderitaan fisik hingga kematian, penderitaan seksual (reproduksi), penderitaan intelektual atau mental, yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal hingga merugikan secara personal.

Gambar 1. Jumlah Kekerasan Seksual di Kota Semarang 2015 - 2024



Sumber : DP3A Kota Semarang

Data kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa fenomena ini masih terus terjadi dan cenderung mengalami peningkatan. Di tingkat daerah, angka kasus kekerasan seksual di Kota Semarang menunjukkan fluktuasi dengan kasus terbanyak pada tahun 2018 yaitu sebanyak

237 kasus dan pada tahun 2024 sebanyak 233 kasus.

Komnas Perempuan menyatakan bahwa karakteristik korban dengan rentang usia korban terbesar pada tahun 2024 adalah pada usia 18-24 tahun dengan profesi terbanyak yang telah dihimpun oleh CATAHU tahun 2024 adalah pelajar/mahasiswa, IRT, dan pegawai swasta dengan data pelaku terbanyak ditemukan pada pegawai swasta, pegawai negeri sipil, guru, dosen, aparat penegak hukum, pemerintah, pelajar, dan tokoh agama yang berjumlah 244 orang atau 7,09% pelaku yang diketahui profesinya.

Tabel 1. Data Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Tahun	Data Komnas Perempuan	Data JPPI
2020	17	92
2021	213	142
2022	385	194
2023	298	285
2024	82	573

Sumber : Catatan Tahunan Komnas Perempuan & Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia

Berdasarkan Tabel 1 terlihat adanya tren peningkatan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan di Indonesia. Data JPPI menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, termasuk lonjakan sebesar 288 kasus pada 2023–2024 tanpa

adanya penurunan. Sementara itu, data CATAHU Komnas Perempuan menunjukkan pola fluktuatif, dengan peningkatan pada 2020–2023 dan penurunan pada 2023–2024. Eskalasi data oleh beberapa sumber memperlihatkan adanya urgensi untuk membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan seksual dalam lingkungan kampus.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPK-PT) melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Kehadiran Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro diharapkan untuk memudahkan korban kekerasan dalam mengakses dan melaporkan kasus kekerasan yang dialami di lingkungan kampus.

Namun, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Keterbatasan akses informasi serta rendahnya tingkat pemahaman civitas akademika terhadap keberadaan dan fungsi Satgas masih menjadi kendala utama, di samping penyebaran informasi terkait prosedur pelaporan dan layanan pendampingan yang belum merata.

Mengutip pada LPM Opini Undip, minimnya sosialisasi, kurangnya penyampaian informasi secara berkala, serta lemahnya penguatan materi menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pengetahuan mahasiswa. Selain itu, terdapat penilaian bahwa penanganan kasus belum sepenuhnya transparan, terutama karena belum tersedianya informasi lanjutan terkait perkembangan laporan.

Menurut Geneva, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BEM Fakultas Hukum, pelaksanaan sosialisasi Satgas PPK-PT dinilai belum efektif karena cenderung menargetkan sosialisasi terhadap mahasiswa Angkatan 2023, sementara mahasiswa angkatan 2021 dan 2022 tidak memperoleh sosialisasi secara berkala. Selain itu, penyampaian informasi kegiatan lebih sering disebarluaskan melalui WhatsApp atau melalui dosen, sehingga jangkauannya belum merata di kalangan mahasiswa.

Permasalahan lain terlihat dari kecenderungan mahasiswa Universitas Diponegoro yang lebih memilih menyampaikan aduan kekerasan seksual melalui media sosial, baik melalui akun pribadi maupun akun *base* kampus seperti @Undipmfs di platform X. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya kepercayaan dan akses terhadap mekanisme pelaporan formal yang disediakan oleh Satgas PPK-PT. Kondisi ini

menunjukkan belum optimalnya kepercayaan dan akses terhadap mekanisme pelaporan formal yang disediakan oleh Satgas PPK-PT UNDIP.

Gambar 2. Aduan Kasus pada Akun Undip Menfess di Aplikasi X



Sumber : Aplikasi X pada akun @Undipmfs

Sementara itu, perbedaan yang kontras terlihat pada pelaksanaan Satgas PPK-PT Universitas Gadjah Mada (UGM). Satgas PPK-PT UGM menunjukkan pengelolaan yang lebih sistematis melalui website yang berisi profil lembaga, artikel-artikel tentang kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut, program Satgas PPK-PT UGM, dan aduan lapor berbasis form. Selain pada perbedaan eksistensi sarana dan prasarana melalui kanal sosial media atau hotline, Satgas PPK-PT UGM dinilai lebih efektif dalam menangani kasus dibandingkan Satgas PPK-PT Undip.

Data pelaporan kasus kekerasan seksual di Undip kepada Satgas PPK-PT Undip adalah sebanyak 16 kasus terhitung dari akhir tahun 2022 hingga 2024, sedangkan Satgas PPK-PT UGM telah menerima laporan sebanyak 90 kasus dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tanggal 20 Januari 2025 Satgas PPKS UGM telah menindak lanjuti salah satu kasus guru besar yang terbukti telah melakukan kekerasan seksual kepada sivitas akademika dan menerapkan sanksi pemecatan melalui keputusan Rektor UGM.

Hal ini mengindikasikan fenomena minimnya komunikasi dalam pelaksanaan Satgas PPK-PT Undip, khususnya dalam kegiatan sosialisasi, baik dari aspek pemberitahuan maupun penyebaran informasi. Rendahnya tingkat pengetahuan sasaran kebijakan terhadap keberadaan dan fungsi Satgas menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam strategi komunikasi serta merumuskan rekomendasi pengembangan bagi Satgas PPK-PT Undip.

KAJIAN TEORI

a. Implementasi Kebijakan

Menurut Syaukani (2004) Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses multidimensional yang

melibatkan serangkaian aktivitas dengan tujuan utama menghantarkan kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat sasaran. George Edward III (1980) menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga bagaimana suatu kebijakan dapat diimplementasikan. Ia mengidentifikasi empat faktor utama yang saling terkait dan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

b. Komunikasi Kebijakan

Komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian suatu informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana itu sendiri maupun kepada sasaran kebijakan agar tujuan, isi, dan prosedur kebijakan dapat dipahami serta dilaksanakan dengan tepat kepada seluruh sasaran kebijakan. George Edward III mengidentifikasi 3 faktor komunikasi kebijakan, yaitu:

1. Transmisi (*Transmission*)

Transmisi mengacu pada bagaimana pihak pelaksana menyampaikan kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung

2. Kejelasan (*Clarity*)

Kebijakan yang disampaikan harus tegas mengenai maksud, tujuan, sasaran, dan substansi pesan yang diberikan.

3. Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi melihat bagaimana suatu kebijakan tersebut disampaikan secara konsisten dalam segi waktu dan Substansi untuk mencegah ketidakpastian di antara pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak-pihak lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pengalaman dan persepsi individu terkait komunikasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat kebijakan sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai praktik yang dialami secara langsung oleh individu di lingkungan kampus.

Situs penelitian berada di Universitas Diponegoro dengan fokus pada implementasi kebijakan melalui Satgas PPK-PT. Subjek penelitian terdiri dari anggota Satgas PPK-PT Undip sebagai pelaksana kebijakan dan mahasiswa serta dosen Undip sebagai bagian dari civitas akademika yang berinteraksi langsung dengan kebijakan tersebut. Data diperoleh melalui Teknik pengumpulan data

wawancara kualitatif dan observasi kualitatif. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data ditentukan melalui triangulasi data dengan triangulasi sumber, teknis, dan temporal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro

Komunikasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro ini dinilai dengan berdasarjan 3 Faktor Komunikasi Kebijakan oleh George Edward III, yaitu Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi.

a. Transmisi

Berdasarkan hasil penelitian, Satgas PPK-PT memiliki sarana komunikasi yang digunakan secara aktif. Sarana tersebut meliputi akun Instagram resmi sebagai media publikasi digital utama, nomor hotline yang dapat dihubungi melalui WhatsApp maupun telepon, serta kanal komunikasi informal yang terhubung melalui jejaring mahasiswa anggota Satgas.

Tabel 2. Perkembangan Kanal Satgas PPK-PT dari awal pembentukan

Tahun	Kanal yang digunakan
2022	Hotline, Email
2023	Hotline, Email, Instagram
2024	Hotline, Email, Instagram
2025	Hotline, Email, Instagram, Line
2026	Hotline, Email, Instagram, Line, X (twitter)

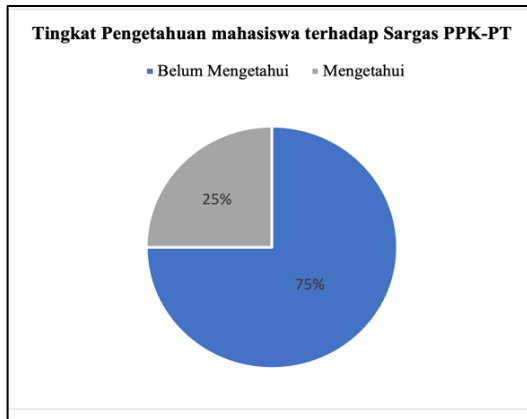
Sumber : Hasil Wawancara Penelitian, 2026

Media sosial Instagram digunakan sebagai kanal yang dominan untuk mengunggah kegiatan dan konten edukatif, sementara hotline dipertahankan sebagai kanal aduan yang dapat dihubungi melalui WhatsApp atau telepon. Selain media digital, Satgas juga menjalankan sosialisasi pada PKKMB dan roadshow ke tiga belas fakultas dan sekolah di wilayah Tembalang serta Pleburan.

Meskipun Satgas PPK-PT memiliki sarana yang cukup lengkap, transmisi komunikasi masih bermasalah pada jangkauan pesan. Penelitian menemukan bahwa sebanyak 75% mahasiswa belum mengetahui keberadaan Satgas PPK-PT sebelum diwawancarai. Selain itu, Mahasiswa lebih banyak mengetahui Satgas PPK-PT melalui kasus yang viral, bukan melalui akun resmi Satgas. Hal ini menunjukkan bahwa arus komunikasi

resmi belum menjadi sumber utama pengetahuan bagi target kebijakan.

Gambar 3. Tingkat Pengetahuan Informan Mahasiswa terhadap Satgas PPK-PT



Sumber : Hasil Wawancara Penelitian, 2026

Perspektif lain menyatakan bahwa metode komunikasi yang terlalu berpusat pada media sosial berpotensi menciptakan kesenjangan penerimaan informasi antar kelompok sasaran karena dinilai kurang relevan bagi kelompok sasaran lain seperti dosen dan tenaga kependidikan yang tidak selalu aktif menggunakan Instagram sebagai sumber informasi utama.

Keterbatasan lain juga ditemukan pada pelaksanaan sosialisasi langsung, dimana kapasitas ruang yang terbatas menyebabkan tidak seluruh mahasiswa dari masing-masing fakultas dapat berpartisipasi pada kegiatan sosialisasi. Akibatnya, informasi yang disampaikan hanya menjangkau sebagian kecil individu yang hadir dalam kegiatan tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa transmisi komunikasi Satgas PPK-PT belum optimal,

khususnya dalam menjangkau informasi pada seluruh sasaran kebijakan.

b. Kejelasan

Aspek kejelasan dinilai berdasarkan bagaimana Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro menjalankan serta mengomunikasikan prosedur penanganan kasus kepada kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, proses penanganan laporan menunjukkan adanya tahapan procedural yang sistematis, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi awal, pemeriksaan, hingga pemberian rekomendasi atau keputusan akhir. Setiap tahapan dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan untuk memberikan arah yang jelas bagi pelaksana dalam menangani laporan atau aduan kasus.

Kejelasan informasi juga dinilai melalui substansi pesan yang diberikan oleh Satgas PPK-PT dalam mengkomunikasikan kebijakan kepada komunitas kampus. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian mahasiswa menilai substansi pesan yang disampaikan oleh Satgas PPK-PT sudah jelas. Beberapa mahasiswa menyatakan jika informasi yang tersedia di Instagram pada dasarnya sudah cukup jelas apabila dibaca secara menyeluruh.

Kejelasan prosedur juga terlihat dalam publikasi resmi yang disampaikan melalui akun Instagram Satgas PPK-PT *melalui*

highlight story dan *Dashboard Monitoring* Satgas PPK-PT. Dalam publikasi tersebut, Satgas PPK-PT menyampaikan secara terbuka jumlah kasus yang masuk, status penanganan, bentuk kekerasan yang dilaporkan dan terbukti, asal pelapor, serta progres penanganan per tahap.

Melalui publikasi tersebut diketahui bahwa sepanjang tahun 2025 Satgas PPK-PT menerima laporan sebanyak 31 dengan 18 kasus (58,1%) dilanjutkan ke tahap penanganan, sementara 13 kasus (41,9%) terhenti. Secara numerik, jika dibandingkan dengan jumlah laporan pada tahun 2025 (31 kasus), terdapat selisih sebesar 15 kasus dibandingkan total 16 kasus pada periode 2022–2024, yang secara matematis setara dengan peningkatan sekitar 93,75%.

Namun, perlu diperhatikan bahwa angka 16 kasus merupakan akumulasi dalam rentang tiga tahun, sedangkan 31 kasus merupakan jumlah laporan dalam satu tahun berjalan, temuan ini dinilai sebagai adanya peningkatan eksposur serta akses terhadap mekanisme pelaporan yang disediakan. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa aspek kejelasan dalam komunikasi kebijakan Satgas PPK-PT Undip sudah menunjukkan struktur internal yang kuat.

c. Konsistensi

Pada aspek konsistensi, Komunikasi Satgas PPK-PT dinilai cukup baik, tetapi masih belum optimal dalam visibilitas

publik. Secara Internal dalam menjaga keselarasan pesan kepada publik Satgas PPK-PT memiliki panduan materi sosialisasi yang terdokumentasi dan prosedur *approval* konten untuk menjaga substansi pesan tetap berada dalam kerangka kebijakan yang sama. Hal ini menunjukkan adanya kontrol internal yang cukup kuat.

Pelatihan internal juga menjadi faktor pendukung dalam substansi pesan yang akan dipublikasikan. Pelatihan yang diterima anggota Satgas PPK-PT bertujuan meningkatkan pemahaman tentang regulasi, prosedur penanganan kasus, dan standar komunikasi untuk meminimalisasi misinterpretasi pesan.

Tetapi hasil penelitian menunjukkan sebagian besar mahasiswa dan dosen tidak dapat menilai secara pasti apakah komunikasi Satgas PPK-PT konsisten atau tidak. Hal ini terjadi karena para penerima kebijakan tidak cukup sering terpapar informasi yang disampaikan oleh Satgas PPK-PT. Informasi tentang Satgas sering kali muncul secara sporadis, misalnya ketika ada kasus viral atau pada kegiatan LKMMPD, sehingga kesan komunikasi Satgas yang terbentuk oleh penerima kebijakan komunikasi adalah tidak konsisten.

Faktor Penghambat komunikasi juga ditemukan pada sumber daya manusia, karena publikasi konten dianggap sebagai

kegiatan *voluntary* oleh beberapa anggota, hal ini disebabkan karena kepentingan waktu anggota yang berbeda-beda sehingga intensitas publikasi tidak terjaga secara periodik. Dengan demikian, masalah konsistensi tidak terlihat pada substansi pesan, tetapi pada kapasitas organisasi untuk memelihara ritme komunikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kontrol internal telah berjalan dengan baik, keterbatasan dalam menjaga ritme komunikasi menyebabkan visibilitas pesan di tingkat publik masih belum optimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Kebijakan

Faktor Pendukung

a. Perluasan kanal komunikasi

Perluasan kanal komunikasi merupakan faktor pendukung dalam implementasi komunikasi kebijakan Satgas PPK-PT. Pemanfaatan berbagai media seperti Instagram, WhatsApp, LINE, email, serta pengembangan platform lain menunjukkan adanya upaya adaptif dalam menjangkau audiens yang heterogen. Diversifikasi kanal ini memungkinkan penyebaran informasi tidak bergantung pada satu medium saja, sehingga meningkatkan potensi terpaparnya informasi di kalangan sivitas akademika. Selain itu, kombinasi antara komunikasi digital dan sosialisasi langsung seperti roadshow fakultas juga memperkuat efektivitas transmisi pesan kebijakan.

Di sisi lain, perluasan kanal komunikasi juga didukung oleh adanya transparansi administratif melalui dokumentasi dan monitoring kegiatan Satgas. Publikasi informasi secara terstruktur, termasuk alur penanganan dan pelaporan, memberikan kejelasan bagi penerima kebijakan. Dengan demikian, perluasan kanal komunikasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga didukung oleh aspek struktural yang meningkatkan kredibilitas dan keterjangkauan informasi.

b. Dukungan kelembagaan dan kapasitas internal.

Dukungan kelembagaan dan internal menjadi faktor dalam menjaga komunikasi kebijakan Satgas PPK-PT. Kolaborasi dengan unit resmi universitas, seperti UPT LKPD-DEM, memperkuat legitimasi Satgas serta memperluas cakupan distribusi informasi. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi langsung melalui PKKMB, roadshow fakultas, dan kegiatan edukasi lainnya menunjukkan adanya upaya sistematis dalam meningkatkan *awareness* sivitas akademika terhadap isu pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi.

Adanya regulasi formal seperti Permendikbud-Ristek, Peraturan Rektor, SOP, serta Pakta Integritas memberikan landasan normatif yang jelas dalam pelaksanaan komunikasi kebijakan. Kerangka regulatif ini didukung oleh

standarisasi materi sosialisasi dan pelatihan internal bagi anggota Satgas. Kombinasi antara dukungan kelembagaan dan penguatan internal tersebut berperan dalam menjaga konsistensi pesan, meminimalkan perbedaan interpretasi, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengomunikasikan kebijakan secara efektif.

Faktor Penghambat

a. Keterbatasan visibilitas lembaga.

Keterbatasan visibilitas Satgas PPK-PT dalam pelaksanaan komunikasi memiliki implikasi besar pada belum meratanya jangkauan informasi, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi komunikasi kebijakan Satgas PPK-PT. Meskipun berbagai kanal komunikasi telah dimanfaatkan, keberadaan dan peran Satgas belum sepenuhnya dikenal oleh seluruh sivitas akademika.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat *exposure* terhadap lembaga dan kebijakan yang diimplementasikan masih relatif rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses transmisi informasi belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara optimal, sehingga sebagian mahasiswa dan dosen masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap fungsi, mekanisme, serta layanan yang disediakan oleh Satgas.

Selain itu, keterbatasan dalam kegiatan sosialisasi tatap muka juga memperkuat hambatan Satgas PPK-PT. Kapasitas ruang dan tingkat partisipasi yang terbatas menyebabkan tidak semua sasaran kebijakan dapat mengikuti kegiatan secara langsung. Di sisi lain, ketergantungan pada media digital tertentu juga membuat jangkauan informasi dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti algoritma dan tingkat keterlibatan audiens. Akibatnya, meskipun komunikasi telah dilakukan secara berulang, pemerataan penerimaan informasi masih belum tercapai secara optimal.

b. Perbedaan preferensi media dan keterbatasan pengelolaan kanal

Perbedaan preferensi media di kalangan sivitas akademika menjadi faktor penghambat dalam efektivitas komunikasi kebijakan. Penggunaan kanal tertentu seperti Instagram dan WhatsApp belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh audiens, meskipun mahasiswa merupakan anggota aktif pengguna sosial media, beberapa dari mahasiswa memiliki perbedaan preferensi penggunaan media tersebut, selain itu media digital dianggap tidak relevan bagi sasaran kebijakan dosen dan tenaga kependidikan yang tidak selalu menggunakan sosial media. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang belum sepenuhnya berbasis pada

preferensi audiens dan dapat mengurangi efektivitas penyampaian pesan.

Keterbatasan sumber daya, seperti pada aspek pendanaan dan pengelolaan media juga menghambat pengembangan kanal komunikasi yang beragam. Pengembangan website resmi belum dapat dioptimalkan karena membutuhkan biaya operasional dan pengelolaan yang berkelanjutan. Hambatan lain juga terlihat pada belum optimalnya distribusi konten melalui media resmi universitas serta keterbatasan sumber daya manusia yang bersifat *voluntary*. Kondisi ini berdampak pada inkonsistensi intensitas publikasi dan pada akhirnya memengaruhi jangkauan serta keberlanjutan komunikasi kebijakan Satgas PPK-PT.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro memiliki variasi pada setiap aspek. Aspek transmisi menjadi yang paling lemah karena keterbatasan jangkauan informasi, tercermin dari sebagian besar informan yang belum mengetahui keberadaan Satgas PPK-PT. Sebaliknya, aspek kejelasan menjadi yang paling kuat karena didukung oleh pedoman yang terstruktur, sehingga substansi pesan dinilai jelas oleh sebagian informan. Sementara itu, aspek konsistensi tergolong relatif baik karena substansi pesan tetap

stabil dan dijaga melalui mekanisme internal, meskipun disampaikan dengan variasi bentuk komunikasi.

Dari sisi faktor pendukung dan penghambat, aspek transmisi memiliki dukungan berupa perluasan kanal dan sosialisasi, namun masih terkendala oleh keterbatasan jangkauan, ketergantungan pada media digital, serta keterbatasan sumber daya. Aspek kejelasan didukung oleh standar dan pelatihan internal, tetapi masih terhambat oleh rendahnya tingkat pengetahuan mahasiswa. Adapun aspek konsistensi diperkuat oleh standardisasi materi, namun masih menghadapi kendala visibilitas. Secara keseluruhan, tantangan utama terletak pada pemerataan eksposur informasi agar komunikasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

SARAN

Berdasarkan masalah yang ditemukan melalui penelitian, dapat diberikan saran untuk mengoptimalkan Komunikasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Diponegoro agar menjangkau seluruh sivitas akademika, yaitu:

- a. Mengoptimalkan strategi transmisi informasi melalui diversifikasi kanal komunikasi yang disesuaikan dengan preferensi dan karakteristik kelompok sasaran, seperti memanfaatkan portal akademik universitas, website resmi

universitas, newsletter kampus, serta penyampaian informasi kebijakan melalui kegiatan akademik seperti di dalam kelas dan kegiatan orientasi mahasiswa.

- b. Memperkuat kolaborasi dengan unit resmi universitas, fakultas, serta organisasi kemahasiswaan untuk memfasilitasi redistribusi informasi secara lebih luas melalui mekanisme *repost* Instagram, portal akademik seperti SSO dan meningkatkan intensitas sosialisasi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang tidak selalu menggunakan sosial media. Pihak lembaga universitas juga diharapkan dapat memberikan dukungan melalui alokasi biaya yang memadai untuk kegiatan sosialisasi dan produksi konten edukatif atau untuk mengoptimalkan website.
- c. Menyusun penjadwalan publikasi konten di media sosial Satgas PPK-PT secara terstruktur untuk meningkatkan *engagement* atau algoritma platform sosial media karena unggahan yang terjadwal dapat membantu meningkatkan *engagement* konten oleh algoritma platform sosial media sehingga jangkauan informasi menjadi lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, George C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Creswell, John. (2017). *Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William M. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Giles, Howard. 1987. "Communication Accommodation Theory: The First Decade and Beyond." Dalam M. L. McLaughlin (Ed.), *Communication Yearbook 10*, hlm. 13–48. Beverly Hills, CA: Sage.
- Rofifah, Salma Putri. (2024). *Efektivitas satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi Universitas Diponegoro dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman* (Skripsi).
- Ashila, Miralda Farah. Alfirmidus, Laila Kholid. Martini, Rina. (2023). *Analisis pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Universitas Diponegoro.
- Pokhrel, Pallav., Bennett, Brooke L., Regmi, Sakshi., Idrisov, Bulat., Galimov, Artur., Akhmadeeva, Leila., & Sussman, Steve. (2018). *Individualism–collectivism, social self-control and adolescent substance use and risky sexual behavior*. *Substance Use & Misuse*, 53(7), 1057–1067. <https://doi.org/10.1080/10826084.2017.1392983>
- Universitas Diponegoro. (2025). *UNDIP perkuat satgas anti kekerasan*:

Wujudkan kampus aman untuk belajar.

Diakses

dari <https://undip.ac.id/post/46787/undip-perkuat-satgas-anti-kekerasan-wujudkan-kampus-aman-untuk-belajar.html>

Universitas Diponegoro. (2025). *UNDIP tingkatkan kesadaran mahasiswa tentang pencegahan kekerasan berbasis gender.*

Diakses

dari <https://undip.ac.id/post/45782/undip-tingkatkan-kesadaran-mahasiswa-tentang-pencegahan-kekerasan-berbasis-gender.html>

Mulyono. (2009). *Model implementasi kebijakan George Edward III.* Diakses dari <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>

Universitas Gadjah Mada. (2025). *UGM Beri Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual di Fakultas Farmasi.* Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/ugm-beri-sanksi-pelaku-kekerasan-seksual-di-fakultas-farmasi/>

Kumparan News.(2024). *Beda dengan UI, UGM Dukung penuh Satgas PPKS, anggarannya tertinggi Rp221 Juta.*

Kumparan.<https://kumparan.com/kumparannews/beda-dengan-ui-ugm-dukung-penuh-satgas-ppks-anggarannya-tertinggi-rp-221-juta-22TuyFUTel0/4>